

	<b>News Title :</b> Dirjen Pajak (DJP) dan Uni Eropa Jadi Kendala CPO RI Masuk Bursa Komoditi	
	<b>Media Name :</b> Sinarharapan.co	<b>Journalist :</b> Yuanita SH
	<b>Publish Date :</b> 01 April 2023	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b> 1	<b>News Value :</b> 3,000,000
	<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 1,000,000
	<b>Section/Rubrication :</b> Ekonomi	<b>Topic :</b> Bursa CPO

## Dirjen Pajak (DJP) dan Uni Eropa Jadi Kendala CPO RI Masuk Bursa Komoditi

Yuanita SH - Sabtu, 1 April 2023 | 09:03 WIB



Dirjen Pajak (DJP) dan Uni Eropa Jadi Kendala CPO Indonesia Masuk Bursa Komoditi. (Foto: MedialNews/Facebook)

**SINAR HARAPAN** - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (Bappebti) saat ini tengah fokus mempersiapkan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk masuk Bursa komoditi.

Bursa komoditi minyak sawit mentah ini diharapkan bisa meluncur pada Juni 2023 yang akan datang.

Menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didid Noordiatmoko, dalam diskusi media di Jakarta, Jumat 31 Maret 2023, pihaknya telah menyiapkan beberapa opsi untuk menjadikan komoditi minyak sawit mentah Indonesia sebagai harga acuan di pasar global.

Namun demikian, mewujudkan Bursa komoditi bukan hal yang mudah dan masih menemui tantangan internal dan eksternal.

Tantangan dari internal datang dari Kemenkeu, Didid mendapatkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa CPO masuk Bursa kena pajak pertambahan nilai (PPN), meski bisa diberlakukan restitusi.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan, CPO masuk Bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanva.

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk Bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," ungkapnya Didid.

Sementara itu secara eksternal, kendala utama CPO masuk Bursa datang dari aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Didid khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk Bursa komoditas.

Meski begitu, apabila CPO berhasil masuk Bursa, Bappebti berencana akan membuat Bursa komoditi lain seperti karet, kopi, kayu manis dan kakao untuk mengikuti jejak tersebut.

"Setelah CPO, kita akan kerjakan lain lagi, kita punya kopi, karet, cassia vera (kayu manis), itu mendominasi dunia. Kita banyak komoditi, tapi itu nanti kita kerjakan pelan-pelan," ujar Didid.

Asal tahu saja, Indonesia merupakan penyumbang 80-100 persen kebutuhan komoditi karet, kopi dan kayu manis di dunia.

Oleh karenanya, diharapkan Indonesia bisa memiliki harga acuan sendiri.

**Baca Juga: Bappepti siap Terbitkan Koin Kripto Baru, Termasuk Karya Anak Bangsa**

"Tentu tidak harus saat ini, mudah-mudahan kita punya roadmap seperti CPO nanti, jadi kita bisa bikin dua secara bersamaan," kata Didid.

Menurut Didid, Bursa komoditi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha dan penerimaan pajak.\*\*\*